

**Dinamika *Intergovernmental Relations* Dan Keberlanjutan KKR
Aceh: Studi Atas Rekomendasi Pencabutan Qanun No. 17 Tahun
2013 Oleh Kementerian Dalam Negeri**

NAJWA SABILLA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika *intergovernmental relations* antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh dalam merespons rekomendasi pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap keberlanjutan kelembagaan KKR Aceh. Penelitian ini menggunakan model *overlapping authority*, kerangka desentralisasi asimetris, dan keberlanjutan lembaga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan empat narasumber yaitu akademisi, Ketua KKR Aceh, Sekretaris Komisi I DPR Aceh, dan analis kebijakan Kemendagri, serta studi pustaka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kemendagri dan Pemerintah Aceh saling beririsan pada persoalan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dapat menyelesaikannya sendiri. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Kemendagri tidak lagi berwenang membatalkan qanun, sehingga rekomendasi pencabutan tidak mengikat secara hukum dan hanya menjadi tekanan politik, sementara Pemerintah Aceh juga tidak dapat menguatkan qanun tanpa dukungan pusat. Akibatnya, persoalan ini tidak diselesaikan, melainkan dibiarkan tanpa kepastian. KKR Aceh tetap ada secara formal tetapi berjalan stagnan; dukungan hukumnya melemah, dan bertahan terutama karena legitimasi moralnya sebagai lembaga keadilan transisi, bukan karena kepastian hukum.

Kata kunci: *intergovernmental relations*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KKR Aceh, Qanun

Intergovernmental Relations Dynamics and the Institutional Sustainability of the Aceh Truth and Reconciliation Commission: A Study of the Ministry of Home Affairs' Recommendation to Revoke Qanun No. 17 of 2013

NAJWA SABILLA

ABSTRACT

This study analyzes the intergovernmental relations between the Ministry of Home Affairs and the Government of Aceh in responding to the recommendation to revoke Aceh Qanun No. 17 of 2013 on the Aceh Truth and Reconciliation Commission (TRC), and examines its implications for the TRC's institutional sustainability. It applies the overlapping authority model, asymmetric decentralization, and institutional sustainability, using a qualitative case study. Data were gathered through interviews with four informants, namely an academic, the Chair of the Aceh TRC, the Secretary of Commission I of the Aceh House of Representatives (DPRA), and a Ministry of Home Affairs policy analyst, alongside a literature review, then analyzed using the Miles and Huberman model of data reduction, data display, and conclusion drawing, with triangulation. The findings show that the two parties' authority overlaps on the same issue, so neither can resolve it alone. After the Constitutional Court's ruling, the Ministry can no longer annul a qanun, so the recommendation is not legally binding and serves only as political pressure, while Aceh cannot strengthen the qanun without central support. The issue is thus left unresolved. The Aceh TRC formally persists but stagnates, enduring mainly through its moral legitimacy as a transitional justice institution rather than legal certainty.

Keywords: *intergovernmental relations; Central Government; Regional Government; Aceh TRC; Qanun*